



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

PERJANJIAN KINERJA

TA . 2025

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mirza Sofjanhadi Mashudi

Jabatan : Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Menteri Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Inspektur Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Mirza Sofjanhadi Mashudi

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai	1.1	Tingkat Maturitas SPIP	3,58
		1.2	Tindak lanjut Rekomendasi BPK	75%
		1.3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,50
		1.4	Opini BPK	WTP
		1.5	Survey Penilaian Integritas (SPI)	82
		1.6	Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3
		1.7	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27
2.	Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang <i>Agile</i>	2.1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	80%
		2.2	Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti	80%
3.	Terwujudnya Transformasi APIP Sebagai <i>Trusted Advisor</i> dan <i>Strategic Partner</i>	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	3 dari 4
		3.2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi	90%
4.	Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik	4.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	85%

Kegiatan

1. Layanan Kegiatan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Total

(Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Anggaran

Rp. 1.150.000.000,-

Rp. 1.150.000.000,-

Pihak kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Inspektur Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



Mirza Sofjanhadi Mashudi



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

RENCANA AKSI

TA . 2025

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	Tingkat Maturitas SPIP	3.58	Pelaksanaan Reviu, Evaluasi dan Pemantauan secara berkala	1. Rapat Pendampingan Penyusunan Matriks Manajemen Risiko 2. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Semester II Tahun 2024 3. Penyusunan <i>Draft</i> Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024	1. Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Unit Kerja 2. Pengisian Kertas Kerja (KK) Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi oleh Unit Kerja 3. Penyusunan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024 4. Penyusunan <i>Draft</i> Peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan	1. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Semester I Tahun 2025 2. Evaluasi SPIP terintegrasi oleh BPKP tahun 2025 3. Penetapan Peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan 4. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat	1. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	75%	Koordinasi dengan unit kerja terkait rekomendasi BPK	1. Pemutakhiran Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK hingga Semester II Tahun 2024	1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Unit Kerja hingga Semester I Tahun 2025	1. Pemutakhiran Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK hingga Semester I Tahun 2025	1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Unit Kerja hingga Semester I/i Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0,5	Pendampingan Pembangunan ZI kepada Unit Kerja	1. Penetapan Penunjukan Unit Kerja Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	1. Penyusunan Matriks Pemantauan Hasil Evaluasi ZI oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Tahun 2024	1. Pendampingan pembangunan ZI di lingkungan unit kerja yang dibangun 2. Pemantauan pelaksanaan pembangunan ZI unit kerja	1. Pemantauan pelaksanaan pembangunan ZI unit kerja 2. Penilaian pembangunan ZI unit kerja oleh Tim Penilai Internal (TPI)
		Opini BPK	WTP	Pengawasan terkait anggaran	1. Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2024 2. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 3. Rapat Koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK 4. Reviu PAPBJ TW I TA 2025	1. Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2. Reviu PAPBJ TW II TA 2025 3. Reviu Revisi/ Tambahan Anggaran Kemenko	1. Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Semester I TA 2025 2. Reviu RKA-K/L Kemenko TA 2026 3. Reviu PAPBJ TW III TA 2025	1. Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TW III TA 2025 2. Reviu PAPBJ TW IV TA 2025
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	82	Evaluasi Hasil SPI	1. Rapat Koordinasi terkait Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024	1. Penunjukkan PIC SPI Tahun 2025 2. Penyusunan dan penyampaian Matriks Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2024 3. Permintaan data calon responden SPI Tahun 2025 kepada unit kerja 4. Penyampaian data responden SPI Tahun 2025 ke KPK	1. Pemantauan Tindak Lanjut hasil SPI Tahun 2024 2. Pemantauan pengisian survei oleh responden 3. Sosialisasi Anti Korupsi	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi SPI selama tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR!	1. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N-LAPOR! Semester II Tahun 2024 2. Memperbarui SK Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR!	1. Pemutakhiran Matriks Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! Semester I Tahun 2025 2. Penyusunan Renaksi SP4N-LAPOR! Tahun 2025-2029	1. Penetapan Renaksi SP4N-LAPOR! Tahun 2025-2029 2. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N-LAPOR! Semester I Tahun 2025 3. Pemantauan Renaksi SP4N-LAPOR! Tahun 2025	1. Pemutakhiran Matriks Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! Semester II Tahun 2025 2. Evaluasi Renaksi SP4N-LAPOR! Tahun 2025
		Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3.27	Pelaksanaan Pengawasan dan Peningkatan kompetensi SDM Inspektorat	1. Audit Ketaatan 2. Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Pengawasan dan SOP 3. Pengisian Profil Inspektorat (IACM) pada Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP 4. Penyusunan <i>Draft</i> matriks Tindak Lanjut Hasil Penilaian IACM Tahun 2024 5. Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	1. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 2. Pengisian Profil Inspektorat (IACM) pada Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP 3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian IACM Tahun 2024 4. Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	1. Audit Kinerja 2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Telaah Sejawat 3. Pengisian Profil Inspektorat (IACM) pada Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP 4. Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 5. Evaluasi IACM oleh BPKP Tahun 2025	1. Pengisian Profil Inspektorat (IACM) pada Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP 2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian IACM Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal Yang Agile	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	80%	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Penetapan PKPT Tahun 2025	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	1. Pelaksanaan Dialog Kinerja 2. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	1. Pelaksanaan Dialog Kinerja 2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 3. Penyusunan PKPT Tahun 2026
		Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti	80%	Monitoring status rekomendasi Pengawasan Internal secara berkala	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester II Tahun 2024	Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester I Tahun 2025	Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi APIP
3	Terwujudnya Transformasi APIP Sebagai <i>Trusted Advisor</i> dan <i>Strategic Partner</i>	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	3 dari 4	Pelaksanaan Survei Setiap Akhir Kegiatan	1. Sosialisasi Layanan Inspektorat 2. Penyusunan <i>Draft</i> Survei Kepuasan Layanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan 4. Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan	1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan 2. Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan	1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan 2. Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan	1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan 2. Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan 3. Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Layanan
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi	90%	Penyelesaian Permintaan Konsultasi	1. Sosialisasi Layanan Inspektorat 2. Penyusunan <i>Logbook</i> Layanan Konsultasi	1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi 2. Rekapitulasi Status Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi	1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi 2. Rekapitulasi Status Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi	1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi 2. Rekapitulasi Status Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
4	Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	85%	Evaluasi AKIP	1. Pengisian Rencana Aksi RB general 2. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	1. Pengisian Simersi TW I 2. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	1. Pelaksanaan Dialog Kinerja 2. Pengisian Simersi TW II 3. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	1. Pelaksanaan Dialog Kinerja 2. Pengisian Simersi TW III 3. Pengisian Simersi TW IV 4. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat

Jakarta, Januari 2025
Inspektur

Mirza Sofjanhadi Mashudi



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

MANUAL IKU

TA . 2025

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 1.1

Perspektif	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan	SK.1. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Terwujudnya SPIP yang memadai memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan tetap menjaga <i>good governance</i> .
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.1 Tingkat Maturitas SPIP
Deskripsi IKU	Definisi
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi adalah nilai yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penilaian Tingkat Maturitas SPIP terdiri dari komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Level Maturitas SPIP terdiri dari: Level 0 = Belum ada; Level 1 = Level Rintisan; Level 2 = Berkembang; Level 3 = Terdefinisi; Level 4 = Terkelola & Terukur; Level 5 = Optimum.
	Formula
	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP. Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP.
	Tujuan
	Untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP / Laporan Penilaian Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (.....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (.....) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan	(..) Triwulanan	(....) Semesteran	(X) Tahunan
----------------	-------------------	-------------------	---------------

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	3.8	3.514	3.55	3.548	3.58
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 1.2

Perspektif	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan	SK.1. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Terwujudnya SPIP yang memadai memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan tetap menjaga <i>good governance</i> .
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Deskripsi IKU	Definisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unit pengawas eksternal melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kemudian memberikan rekomendasi atas temuan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas temuan dari BPK yang dilakukan oleh auditi. Ruang lingkup rekomendasi yaitu terkait sistem pengendalian internal dan tata kelola. Status tindak lanjut selesai atau belum ditentukan oleh BPK. Formula $\text{Tindak Lanjut Rekomendasi BPK} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan BPK}} \times 100\%$ Tujuan Untuk mengetahui tingkat rekomendasi dari BPK yang telah ditindaklanjuti oleh auditi
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur, Kepala Biro Umum
Sumber Data	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (.....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (.....) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(.....) Bulanan (..) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	90%	92,22%	75%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 1.3

Perspektif

(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Kegiatan

SK.1. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Terwujudnya SPIP yang memadai memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan tetap menjaga *good governance*.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Deskripsi IKU

Definisi	
Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dalam hal ini KemenPANRB. Terdapat 3 tahap evaluasi oleh TPN yaitu pra-evaluasi atau seleksi administrasi, <i>desk evaluation</i> , dan evaluasi lapangan.	
Berikut kategori penilaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas:	
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Nilai
>75%	3
>40% - 75%	2
>10% - 40%	1
0,1% - 10%	0,75
0%	0,5
Tidak Mengusulkan	0
Formula	
Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	
Tujuan	
Tujuan pengukuran tingkat keberhasilan zona integritas adalah untuk mengetahui tingkat pembangunan ZI di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian untuk mewujudkan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.	

Satuan Pengukuran

Nilai

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Pejabat Penanggung Jawab Data

Inspektur

Sumber Data

Surat Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Tingkat Kendali IKU

(....) High (X) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(....) Exact (X) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (....) Cascading Non-Peta (....) Non-Cascading

Metode Cascading (.....) Direct (x) Indirect

Polarisasi IKU (X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan (.....) Bulanan (..) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	0,5
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 1.4

Perspektif	☒ Stakeholder ☐ Customer ☐ Internal Business Process ☐ Learning & Growth			
Sasaran Kegiatan	SK.1. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Terwujudnya SPIP yang memadai memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan tetap menjaga <i>good governance</i> .			
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.4 Opini BPK			
Deskripsi IKU	Definisi Opini BPK merupakan pengakuan dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Opini yang dihasilkan terdiri dari 4 jenis, yaitu: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai capaian 4), 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP, Nilai capaian 3), 3) Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian 2), 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP/<i>Disclaimer</i>, Nilai Capaian 1). Formula Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2024 Tujuan Memberikan pernyataan atau opini bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.			
Satuan Pengukuran	Predikat			
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)			
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur, Kepala Biro Umum			
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2024			
Tingkat Kendali IKU	☐ High ☒ Moderate ☐ Low			
Tingkat Validitas IKU	☒ Exact ☐ Proxy ☐ Activity			
Jenis Konsolidasi Periode	☐ Sum ☐ Average ☒ Take Last Known Value			
Jenis Cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non-Peta ☐ Non-Cascading			
Metode Cascading	☒ Direct ☐ Indirect			
Polarisasi IKU	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize			
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	WTP	WTP	WTP
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 1.5

Perspektif	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan	SK. 1. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Terwujudnya SPIP yang memadai memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan tetap menjaga <i>good governance</i> .
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.5 Survey Penilaian Integritas (SPI)
Deskripsi IKU	Definisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) secara mandiri dengan dibantu oleh pihak ketiga. Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (<i>trading in influence</i>), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai mitra KPK dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) membantu menyediakan data responden yang diperlukan oleh KPK. Formula Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tujuan Untuk mengukur tingkat integritas organisasi sebagai salah satu ukuran keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi.
Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(.....) Exact (X) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(.....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(.....) Bulanan (..) Triwulanan (.....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	82
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 1.6

Perspektif

(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Kegiatan

SK.1 Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Terwujudnya SPIP yang memadai memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan tetap menjaga *good governance*.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

Deskripsi IKU

Definisi	
LAPOR adalah kanal pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagai amanat dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, LAPOR dimanfaatkan menjadi aplikasi umum untuk layanan pengaduan. Pemanfaatan aplikasi LAPOR dapat dilihat dari seberapa sering masyarakat menggunakan aplikasi LAPOR sebagai sarana menyampaikan pengaduan kepada K/L/D. Tidak terbatas pada pengaduan, LAPOR juga dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan melakukan permintaan informasi. Kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan LAPOR diukur dengan 6 kriteria yaitu:	
1) Memiliki SK Pengelola, 2) Memiliki Rencana aksi, 3) 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan, 4) Kecepatan tindak lanjut < 3 hari, 5) Pengaduan ditindaklanjuti secara substantif 6) Rata-rata rating penilaian masyarakat >4	
Berikut kategori penilaian Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR):	
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR	Nilai
Memenuhi 6 indikator	5
Hanya memenuhi 4 dari 6 indikator	4
Hanya memenuhi 3 dari 6 indikator	3
Hanya memenuhi 2 dari 6 indikator	2
Hanya memenuhi maksimal 1 dari 6 indikator	1
Formula	
Hasil evaluasi atas tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) tahun 2025 yang dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	
Tujuan	
Untuk mengukur tingkat pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR! yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja	

Satuan Pengukuran

Nilai

Unit/Pihak Penyedia Data

Inspektorat, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Inspektur, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Sumber Data

Aplikasi LAPOR, Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR)

Tingkat Kendali IKU

(.....) High (X) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU	☒ Exact ☐ Proxy ☐ Activity
Jenis Konsolidasi Periode	☐ Sum ☐ Average ☒ Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	☐ Cascading Peta ☒ Cascading Non-Peta ☐ Non-Cascading
Metode Cascading	☒ Direct ☐ Indirect
Polarisasi IKU	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	3
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 1.7

Perspektif	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan	SK.1 Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Terwujudnya SPIP yang memadai memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan tetap menjaga <i>good governance</i> .
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
Deskripsi IKU	Definisi Kapabilitas APIP (IACM) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Nilai Kapabilitas APIP diberikan oleh BPKP sesuai dengan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan. Selain itu Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas APIP dilaksanakan secara mandiri sebagai upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses pengawasan. Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) komponen yaitu: dukungan pengawasan (<i>enabler</i>), aktivitas pengawasan (<i>delivery</i>), dan kualitas pengawasan (<i>result</i>). Adapun untuk masing-masing komponen terdiri dari beberapa elemen, antara lain: dukungan pengawasan (<i>enabler</i>) terdiri dari 5 (lima) elemen: pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; budaya dan hubungan organisasi; dan struktur tata kelola, aktivitas pengawasan (<i>delivery</i>) terdiri dari 2 (dua) elemen: <i>assurance</i> dan <i>consulting</i>, kualitas pengawasan (<i>result</i>) merujuk pada hasil kualitas pengawasan APIP yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E); memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Level Kapabilitas APIP terdiri dari lima tingkatan yaitu: Level 1 = Initial, Level 2 = Infrastructure, Level 3 = Integrated, Level 4 = Managed, Level 5 = Optimizing. Dalam hal BPKP belum menerbitkan laporan hasil penjaminan kualitas pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP. Formula Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh BPKP atau Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh Inspektorat. Tujuan Untuk memperoleh keyakinan dan mengukur tingkat kapabilitas APIP yang sebenarnya dan mengidentifikasi hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk membentuk pengawasan internal yang efektif di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (IACM) oleh BPKP/ Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (IACM) oleh Inspektorat

Tingkat Kendali IKU	☐ (.....) High ☒ (X) Moderate ☐ (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	☒ (X) Exact ☐ (.....) Proxy ☐ (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	☐ (.....) Sum ☐ (.....) Average ☒ (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	☒ (X) Cascading Peta ☐ (.....) Cascading Non-Peta ☐ (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	☒ (X) Direct ☐ (.....) Indirect
Polarisasi IKU	☒ (X) Maximize ☐ (.....) Minimize ☐ (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	☐ (.....) Bulanan ☐ (..) Triwulanan ☐ (.....) Semesteran ☒ (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	Level 4 pada 3 elemen	Level 4 pada 1 elemen	3.1	3.25	3.27
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 2.1

Perspektif

(...) Stakeholder (X) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Kegiatan

SK. 2 Terwujudnya Transformasi APIP Sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner*

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Transformasi APIP mengubah peran **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** dari yang sebelumnya bersifat administratif dan fokus pada kepatuhan menjadi *Trusted Advisor* yaitu entitas yang dipercaya oleh pimpinan dan pemangku kepentingan sebagai pemberi nasihat yang independen, profesional, dan bernilai tambah tinggi serta *Strategic Partner* dimana APIP terlibat aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis organisasi. Dalam peran ini, APIP tidak hanya menjadi pengawas pasif yang mencari kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga memberi masukan strategis dan memastikan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal mendukung pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat

Deskripsi IKU

Definisi

Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan dengan melakukan survey layanan kepada unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Daftar pertanyaan ini memuat tentang 5 aspek-aspek penilaian yang memuat tentang jenis-jenis layanan di lingkungan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, serta output dari peningkatan yang dihasilkan. Aspek – aspek penilaiannya meliputi :

1. **Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);**
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. **Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);**
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. **Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);**
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. **Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);**
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. **Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)**
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Pada akhir survey terdapat tambahan form penulisan saran dan perbaikan. Jumlah Responden dipilih secara acak/random, dan berasal dari unit kerja di luar unit Inspektorat. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan 4 kategori, yaitu :

1. Sangat Puas
2. Puas
3. Tidak Puas
4. Sangat Tidak Puas

Formula

Adapun formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Bv adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Tujuan

Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan pengawasan atas kualitas layanan yang diberikan oleh Inspektorat.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Inspektorat

Pejabat Penanggung Jawab Data

Inspektur

Sumber Data

Hasil Survey Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat

Tingkat Kendali IKU

(X) High (.....) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (.....) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(.....) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading

(.....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (..) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 2.2

Perspektif	(...) Stakeholder (X) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan	SK.2 Terwujudnya Transformasi APIP Sebagai <i>Trusted Advisor</i> dan <i>Strategic Partner</i>
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Transformasi APIP mengubah peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari yang sebelumnya bersifat administratif dan fokus pada kepatuhan menjadi <i>Trusted Advisor</i> yaitu entitas yang dipercaya oleh pimpinan dan pemangku kepentingan sebagai pemberi nasihat yang independen, profesional, dan bernilai tambah tinggi serta <i>Strategic Partner</i> dimana APIP terlibat aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis organisasi. Dalam peran ini, APIP tidak hanya menjadi pengawas pasif yang mencari kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga memberi masukan strategis dan memastikan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal mendukung pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi
Deskripsi IKU	Definisi Peran konsultansi APIP adalah salah satu fungsi utama dalam kerangka pengawasan intern pemerintah selain fungsi <i>assurance</i> (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan). Dalam fungsi konsultansi, APIP memberikan masukan, pendampingan, dan solusi kepada unit kerja atau perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Kegiatan Konsultansi bertujuan untuk membantu unit kerja mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, mendorong terciptanya tata kelola yang baik (<i>good governance</i>), dan memperkuat peran APIP sebagai <i>trusted advisor</i>. Formula $\% \text{ Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi} = \frac{\text{Kegiatan Konsultansi yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Permintaan konsultansi yang masuk}}$ Tujuan Untuk mengetahui tingkat keaktifan APIP dalam peran konsultatif, bukan hanya audit/reviu dan meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antara APIP dan pengguna layanan.
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Matriks data pelaksanaan kegiatan konsultansi
Tingkat Kendali IKU	(X) High (.....) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (.....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(.....) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading	(.....) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(.....) Bulanan (..) Triwulanan (.....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	90%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 3.1

Perspektif	(...) Stakeholder (...) Customer (X) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan	SK.3 Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang <i>Agile</i>
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) membangun sistem pengawasan yang adaptif, responsif, dan proaktif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis dan operasional. Melalui pendekatan <i>agile</i> , pengawasan internal diharapkan mampu melaksanakan pengawasan berbasis risiko secara dinamis, menyesuaikan strategi pengawasan dengan perubahan kebutuhan organisasi, mempercepat penyampaian rekomendasi yang relevan, serta meningkatkan kolaborasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan efektivitas tindak lanjut.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
Deskripsi IKU	Definisi
	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan yang telah direncanakan dalam satu tahun. Kegiatan pengawasan yang dimaksud mencakup seluruh bentuk pengawasan internal, seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan lainnya yang tercantum dalam PKPT Inspektorat 2025.
	Formula
	$\text{Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengawasan Terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Pengawasan di PKPT}} \times 100\%$
	Tujuan
	Untuk mengukur realisasi pengawasan yang dilaksanakan dari PKPT Inspektorat yang telah direncanakan
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat, Sekretariat, dan Deputi Kemenko Bidang Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Dai	Inspektorat Kemenko Bidang Perekonomian
Sumber Data	Undangan, Nota Dinas, Notulensi, Laporan, dan lain-lain
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (.....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (.....) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	80%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 3.2

Perspektif	(...) Stakeholder (...) Customer (X) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan	SK.3 Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang <i>Agile</i>
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengupayakan dan melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta mendukung pengelolaan data dan informasi yang andal dan mutakhir oleh unit kerja. Hal ini bertujuan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penyediaan dokumen dan bukti dukung terkait pelaksanaan kinerja sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal yang ditindaklanjuti Auditi
Deskripsi IKU	Definisi Inspektorat sebagai unit pengawas internal melakukan kegiatan Audit dan memberikan rekomendasi atas temuan yang disajikan dalam laporan hasil audit. Inspektorat melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh auditi. Auditi dapat dikatakan telah menindaklanjuti rekomendasi ketika auditi menyelesaikan aksi korektif sesuai dengan rekomendasi atau Ditindaklanjuti secara penuh, sebagian, atau dengan alternatif yang disetujui selanjutnya bukti tindak lanjut akan diverifikasi atau divalidasi oleh APIP.
	Formula $\text{Persentase Rekomendasi Audit Internal yang ditindaklanjuti Auditi} = \frac{\text{Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$
	Tujuan Untuk mengukur efektivitas fungsi pengawasan APIP, khususnya dalam memastikan bahwa temuan dan rekomendasi hasil audit internal benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit (auditi).
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti Auditi
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (.....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (.....) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(.....) Bulanan (..) Triwulanan (.....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	80%	82,14%	80%	83,33%	80%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 4.1

Perspektif	(...) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (X) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan	SK.4 Terwujudnya Tata Kelola APIP yang Baik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<i>Good governance</i> dan <i>clean government</i> adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, serta bersih dan berwibawa atau terhindar dari penyalahgunaan alokasi anggaran/korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat
Deskripsi IKU	Definisi Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Inspektorat didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Inspektorat. Implementasi kegiatan RB General di Inspektorat harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun.
	Formula Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Inspektorat dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat: $\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$
	Pada tahun 2025, Inspektorat melaksana dukungan terhadap indikator Reformasi Birokrasi lainnya diluar Renaksi yang diampu oleh Inspektorat yang meliputi: 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Tingkat Digitalisasi Arsip 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 5. Indeks Sistem Merit 6. Capaian IKU
	Tujuan Mengukur persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	Rekapitulasi/ Tabulasi Data Pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat kementerian
Tingkat Kendali IKU	(....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (....) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non-Peta ☐ Non-Cascading
Metode Cascading	☒ Direct ☐ Indirect
Polarisasi IKU	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	NA	NA	NA	NA	85%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-